

Abul Haris Suryo Negoro, Restu Widy Sasongko, Hilarius Wandan,
Desna Aromatica, Haerana, Frederikus Antonius Mana, Cataryn V. Adam
Sri Juni Woro Astuti, Marini Sari Dewi Seger, Daelami Ahmad.



Pengantar Ilmu **ADMINISTRASI PUBLIK**



Pengantar Ilmu **ADMINISTRASI PUBLIK**

Abul Haris Suryo Negoro, Restu Widy Sasongko, Hilarius Wandan,
Desna Aromatica, Haerana, Frederikus Antonius Mana, Cataryn V. Adam
Sri Juni Woro Astuti, Marini Sari Dewi Seger, Daelami Ahmad.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Tim Penulis:

**Abul Haris Suryo Negoro, Restu Widyo Sasongko, Hilarius Wandan,
Desna Aromatica, Haerana, Frederikus Antonius Mana, Cataryn V. Adam,
Sri Juni Woro Astuti, Marini Sari Dewi Seger, Daelami Ahmad.**

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-246-353-6

Cetakan Pertama:

Oktober, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Pengantar Ilmu Administrasi Publik” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Pengantar Ilmu Administrasi Publik.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan *“tiada gading yang tidak retak”* dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Pengertian Administrasi Publik.....	2
B. Sejarah dan Perkembangan Administrasi Publik.....	3
C. Ruang Lingkup Administrasi Publik.....	5
D. Pentingnya Administrasi Publik Dalam Pemerintahan	7
E. Rangkuman Materi	9
BAB 2 TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK	13
A. Teori Klasik.....	14
B. Teori Neo Klasik	18
C. Teori Modern.....	23
D. Teori Kontemporer Administrasi Publik	27
E. Rangkuman Materi	32
BAB 3 BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	43
A. Pengertian dan Karakteristik Birokrasi	44
B. Model Birokrasi Weberian.....	45
C. Reformasi Birokrasi.....	47
D. Kritik Terhadap Birokrasi	49
E. Rangkuman Materi	50
BAB 4 ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK.....	55
A. Pengertian Organisasi Publik	56
B. Struktur Organisasi	57
C. Dinamika dan Budaya Organisasi	58
D. Organisasi Publik Vs Organisasi Privat.....	60
E. Rangkuman Materi	61
BAB 5 MANAJEMEN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	65
A. Pendahuluan.....	66
B. Fungsi Manajemen Publik	67
C. Proses Perencanaan	70

D. Pengorganisasian dan Pengarahan.....	72
E. Pengawasan Dalam Administrasi Publik.....	74
F. Rangkuman Materi	76
BAB 6 KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	81
A. Pendahuluan.....	82
B. Konsep Kepemimpinan.....	83
C. Gaya Kepemimpinan Dalam Administrasi Publik	86
D. Kepemimpinan Transformatif dan Transaksional	89
E. Tantangan Kepemimpinan di Sektor Publik	93
F. Rangkuman Materi	96
BAB 7 ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK	103
A. Pentingnya Etika Dalam Pelayanan Publik	104
B. Prinsip dan Nilai Etika Dalam Pelayanan Publik	111
C. Kasus Pelanggaran Etika Administrasi Publik	118
D. Upaya Penegakan Etika Administrasi Publik	119
E. Rangkuman Materi	122
BAB 8 REFORMASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	127
A. Pendahuluan.....	128
B. Konsep Reformasi Administrasi Publik	129
C. Good Governance Dalam Administrasi Publik.....	135
D. Transparansi dan Akuntabilitas	139
E. Partisipasi Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	144
F. Rangkuman Materi	149
BAB 9 ANGGARAN SEKTOR PUBLIK.....	155
A. Konsep Anggaran Sektor Publik.....	156
B. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik	158
C. Pengawasan Anggaran Sektor Publik	167
D. Transparansi Anggaran Sektor Publik.....	169
E. Rangkuman Materi	171
BAB 10 ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL	177
A. Pendahuluan.....	178
B. Digitalisasi Administrasi Publik	180

C. E-Government dan Pelayanan Publik Digital.....	182
D. Tantangan Transformasi Digital Dalam Administrasi Publik	205
E. Kebijakan Teknologi Dalam Administrasi Publik.....	213
F. Rangkuman Materi	219
GLOSARIUM	235
PROFIL PENULIS.....	255



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 1: KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si

FISIP Universitas Jember

BAB 1

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik adalah disiplin ilmu sekaligus praktik yang berorientasi pada pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara konseptual, administrasi publik mencakup serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Aktivitas ini bukan hanya bersifat teknis birokrasi, tetapi juga terkait erat dengan aspek politik, hukum, dan sosial yang membentuk dinamika kehidupan bernegara (Rosenbloom, Kravchuk, & Clerkin, 2015). Oleh karena itu, administrasi publik dapat dipahami sebagai sistem yang menghubungkan negara dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Waldo (1984) memandang administrasi publik sebagai ekspresi nyata dari teori politik yang diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan praktik pemerintahan. Menurutnya, administrasi publik tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai politik karena birokrasi selalu menjadi arena pertarungan kepentingan dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya berbicara mengenai efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga mengenai legitimasi, etika, dan keadilan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Sejalan dengan itu, Denhardt dan Denhardt (2015) melalui konsep *New public Service* menekankan bahwa administrasi publik seharusnya mengedepankan orientasi pelayanan publik daripada sekadar pengendalian atau pengaturan. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah “melayani, bukan mengendalikan”, yang berarti birokrasi harus menempatkan warga negara sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, administrasi publik tidak lagi bersifat hierarkis semata, melainkan kolaboratif dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2015). *The Public Administration Theory Primer*. Westview Press.
- Hasbi, I., Hartoto, H., Maharani, D., Sriyani, S., Latifah, E. D., Mahardhani, A. J., ... & Putra, F. S. D. (2021). *Kebijakan Publik*.
- Helpiastuti, S. B. *Buku Pengantar Administrasi Publik: Tinjauan Teori*. Penerbit Widina.
- Negoro, A. H. S., Pahmi, S., Enala, S. H., Holivil, E., Nurdialy, M., Djasuli, M., ... & Arintyas, A. P. R. D. A. (2025). *Manajemen Administrasi Publik*.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Stillman, R. J. (2010). *Public Administration: Concepts and Cases*. Cengage Learning.
- Subandi, M. *Buku Manajemen Administrasi Pembangunan*. Penerbit Widina.
- Waldo, D. (1984). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Holmes & Meier.
- Widyawati, N., Mahriani, E., Yudawisastra, H. G., Zulfikar, R., Bagenda, C., Aziz, L. H., ... & Setianingsih, R. E. (2023). *Pengantar Administrasi Bisnis*.
- Yuliani, I. (2025). Kemitraan dalam perspektif administrasi publik. *Dinamika Kemitraan Sektor Publik*, 47.



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 2: TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

BAB 2

TEORI – TEORI ADMINISTRASI PUBLIK

A. TEORI KLASIK

1. Definisi Teori Klasik

Teori klasik administrasi publik mengacu pada pendekatan awal yang dikembangkan untuk memahami dan mengatur organisasi pemerintahan serta pelayanan publik. Salah satu dasar dari teori ini adalah sistem mekanistik yang menekankan efisiensi dan struktur formal. Dalam konteks ini, administrasi publik dilihat sebagai suatu sistem yang terstruktur secara hirarkis dengan fokus pada pembagian tugas dan spesialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Sistem ini mengandalkan prinsip-prinsip seperti rasionalitas, formalitas, dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi dilakukan dengan cara yang paling efisien dan efektif (Nuryeni et al., 2022).

Dalam teori klasik, efisiensi menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas administrasi publik. Henry Fayol dan Max Weber, sebagai tokoh sentral, berkontribusi pada pengembangan konsep struktur organisasi dan prinsip-prinsip manajemen yang sistematis. Fayol menekankan pentingnya pengaturan yang jelas dalam organisasi, termasuk pembagian kerja, otoritas yang jelas, dan proses komunikasi yang terstruktur. Di sisi lain, Weber menekankan pentingnya birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional, di mana setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berkontribusi pada penciptaan stabilitas dan keberlanjutan dalam administrasi publik (Nafisah & Marwiyah, 2022).

Jika dilihat dari perspektif ini, struktur formal dianggap esensial dalam memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi dengan efektif. Dengan adanya hierarki yang jelas, setiap anggota dalam organisasi dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Ardielli, E. (2015). Public administration transparency in e-government at local level of czech government. *The International Journal of Management Science and Business Administration*, 2(8), 24-33. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.28.1003>
- Arthamevia, V. and Oktariyanda, T. (2023). Analisis inovasi layanan berbasis website sipentolmanis (sistem pelayanan terpadu online kecamatan jetis) di kabupaten Mojokerto. *Publika*, 2351-2364. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2351-2364>
- Bhuiyan, S. and Perry, J. (2023). Building global public administration knowledge: leveraging the power of collaboration. *Public Administration Review*, 84(3), 426-431. <https://doi.org/10.1111/puar.13768>
- Bourgon, J. (2007). Responsive, responsible and respected government: Towards a new public administration theory. *International Review of Administrative Sciences*, 73(1), 7-26. <https://doi.org/10.1177/0020852307075686>
- Bryson, J., Crosby, B., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456. <https://doi.org/10.1111/puar.12238>
- Cellary, W., & Picard, W. (2011). *Agile and proactive public administration as a collaborative networked organization*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1111.5737>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The new public service: Serving, not steering*. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
- Firmansyah, M., Suman, A., Manzilati, A., & Susilo, S. (2012). Perdebatan teori rasionalitas dalam menjelaskan terbentuknya biaya transaksi pada seleksi pegawai negeri. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(1), 69-89. <https://doi.org/10.21002/jepi.v13i1.26>

- Gofur, R. and Jumiati, I. (2021). Kelembagaan badan usaha milik desa di kabupaten buton selatan. *Administratio Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(2), 121-138. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.232>
- Guarido, F., Nogueira, E., & Costa, M. (2021). Resilience and permanence of public values: an analysis of administrative contracts in brazil. *Cadernos Ebape Br*, 19(spe), 745-760. <https://doi.org/10.1590/1679-395120200199>
- Haryono, N. (2021). Perbandingan reformasi manajemen publik indonesia dan perancis. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.2075>
- Henry, N. (2018). *Public administration and public affairs* (13th ed.). New York, NY: Routledge.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- HP University. (n.d.). *Introduction to Public Administration* [PDF]. Retrieved from <https://www.hpuniv.ac.in/hpuniv/upload/uploadfiles/files/PG%20MPUB%20101%20%281st%20Sem%29%20Introduction%20to%20Public%20Administration.pdf>
- Jaya, I. (2021). Perjalanan panjang ilmu administrasi publik (dari paradigma klasik menuju kontemporer). *Journal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.37304/jispar.v3i1.371>
- Kandrina, N., Kazantseva, O., & Konovalova, L. (2020). Public administration in modern russia: ecological consequences of the digitalization. *Ukrainian Journal of Ecology*, 10(6), 169-172. https://doi.org/10.15421/2020_277
- Khumairoh, I. (2018). Ayo menikah (muda)! : mediatisasi ajaran islam di media sosial. *Indonesian Journal of Anthropology*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/umbara.v2i1.15671>

- Kukovič, S. and Justinek, G. (2020). Modernisation trends in public administration in slovenia. *Hrvatska I Komparativna Javna Uprava*, 20(4), 623-647. <https://doi.org/10.31297/hkju.20.4.2>
- Maritza, D. and Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84. <https://doi.org/10.33592/jiia.v14i2.4679>
- Mayo, E. (1949). *The social problems of an industrial civilization*. Boston, MA: Harvard University Press.
- Mulia, R. and Hertati, D. (2024). Implementasi pelayanan jemput bola pada pemutakhiran biodata kartu keluarga di kecamatan genteng kota surabaya. *Prediksi Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 23(1), 76. <https://doi.org/10.31293/pd.v23i1.7538>
- Nafisah, A. and Marwiyah, S. (2022). Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan melalui kanal website go digital (godigi) di mal pelayanan publik kabupaten probolinggo. *Jurnal Niara*, 15(3), 507-513. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.10832>
- Nasution, S. and Fitryantica, A. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam bidang pelayanan publik berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan melalui aplikasi e-open di kota bekasi. *Focus*, 4(2), 198-204. <https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361>
- Nuryeni, N., Asmiddin, A., & Didi, L. (2022). Kualitas pelayanan pendidik dalam proses pembelajaran di era pandemi covid-19 (studi pada sma negeri 2 kota baubau). *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 200-212. <https://doi.org/10.55340/administratio.v11i3.1052>
- Pambudi, H., Nugroho, A., Handoko, L., & Dianastiti, F. (2021). Buzzer di masa pandemi covid-19: studi analisis wacana kritis kicauan buzzer di twitter. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23(1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1265>
- Pratama, M. (2018). Proyeksi fundamen pelayanan publik menuju pelayanan publik ideal. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 88-96. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.137>

- Purna, Z. and Didin, D. (2022). Birokrasi dalam ekosistem politik. masihkah birokrasi menjadi artikulator pilihan publik?. Jurnal Arajang, 5(1), 76-98. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2731>
- Rahardian, R. (2024). Teori-teori governansi dan kebijakan publik kontemporer.. <https://doi.org/10.55981/brin.998>
- Ramadhan, F. and Khoirunurrofik, K. (2024). Akuntabilitas dan kondisi keuangan daerah otonomi khusus pada provinsi aceh, papua, dan papua barat. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 14(1), 33-45. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2382>
- Rokhman, B., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). Implementasi etika administrasi publik dalam pencapaian good governance di indonesia. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(7), 915-924. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i7.3950>
- Saputra, B., Suropto, S., & Chrisdiana, Y. (2018). Indigeneous public administration: melihat administrasi publik dari perspektif kearifan lokal (local wisdom). Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 15(2), 278-292. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.180>
- Saputra, T. and Frinaldi, A. (2023). Systematic literature review inovasi pelayanan publik berbasis digital. Menara Ilmu, 17(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v17i1.4534>
- Sellfia, N., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun purwakarta. Kinerja, 18(4), 590-598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>
- Septiandika, V. and Aderovi, M. K. A. (2022). Efektivitas layanan cepat administrasi kecamatan guna mendorong lahirnya good governance. Populika, 10(2), 33-41. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.507>
- Setiawan, T. and Warsa, N. (2018). Public social private partnership (pspp) dalam penyediaan infrastruktur publik. Jurnal Borneo Administrator, 13(3), 203-220. <https://doi.org/10.24258/jba.v13i3.295>
- Simon, H. A. (1976). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (3rd ed.). New York, NY: The Free Press.
- Stillman, R. J. (2009). *Public administration: Concepts and cases* (9th ed.). Boston, MA: Wadsworth.

- Sulfiani, a. n. and Firdaus, R. (2022). Pengawasan pemerintah dalam praktek illegal logging di kelurahan battang kecamatan wara barat kota palopo. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 263-282. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i2.110>
- Sutangsa, S. (2024). Peran aparat administrasi publik dalam pencegahan korupsi: suatu analisis perspektif. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i2.1888>
- Waldo, D. (1968). *The study of public administration*. New York, NY: Random House
- Wibowo, A. and Kertati, I. (2022). Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 01. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>
- Wright, B. (2015). The science of public administration: problems, presumptions, progress, and possibilities. *Public Administration Review*, 75(6), 795-805. <https://doi.org/10.1111/puar.12468>
- Zica, T. and Fanida, E. (2022). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui aplikasi administrasi kependudukan cepat akurat terintegrasi (pandu cakti) di kantor dispendukcapil kabupaten tulungagung. *Publika*, 487-498. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p487-498>
- Zulkenedi, Z., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi administratif untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4326-4333. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12595>



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 3: BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Hilarius Wandan, S.Sos., M.Si.

Universitas Lelemuku Saumlaki

BAB 3

BIROKRASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK BIROKRASI

Birokrasi dalam administrasi publik merupakan salah satu konsep fundamental yang membahas bagaimana suatu sistem organisasi pemerintahan diatur agar mampu menjalankan fungsi negara secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Birokrasi tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aparatur yang bekerja di balik meja pemerintahan, tetapi juga sebagai suatu mekanisme yang mengatur pembagian tugas, hierarki kewenangan, dan tata kelola pelayanan publik. Menurut Putra (2020), birokrasi adalah instrumen utama yang memungkinkan pemerintah mengimplementasikan kebijakan publik, menjaga keteraturan administrasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sistematis.

Dari perspektif administrasi publik, birokrasi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai alat kontrol sekaligus alat pelayanan. Sebagai alat kontrol, birokrasi berfungsi menjaga stabilitas, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan sebagai alat pelayanan, birokrasi dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel (Suryanto, 2021). Dengan demikian, birokrasi memegang peranan vital dalam menjembatani kepentingan negara dengan kebutuhan warga negara.

Adapun karakteristik birokrasi dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, adanya hierarki kewenangan yang jelas, di mana setiap pejabat birokrasi memiliki posisi dan tanggung jawab yang terstruktur dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Kedua, terdapat pembagian kerja yang rinci sehingga setiap pegawai mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga, birokrasi dijalankan melalui aturan formal yang sistematis sehingga segala tindakan didasarkan pada norma hukum dan prosedur yang baku (Wahyudi, 2019). Keempat, birokrasi memiliki sifat impersonalitas, artinya

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R. (2021). *Birokrasi dan Tantangan Reformasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kurniawan, A. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, Y. (2022). *Digitalisasi Layanan Publik dan Transformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, D. (2020). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Rizky, M. (2018). *Birokrasi Weberian dalam Konteks Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Santoso, B. (2017). *Kritik terhadap Model Birokrasi Modern*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryanto, A. (2021). *Birokrasi dan Budaya Patrimonial di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, R. (2019). *Karakteristik Birokrasi dalam Administrasi Negara*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Wicaksono, T. (2020). *Inovasi Birokrasi di Era Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Yuliani, E. (2019). *Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 4: ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Desna Aromatica, M.AP

Universitas Andalas

BAB 4

ORGANISASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENGERTIAN ORGANISASI PUBLIK

Organisasi publik merupakan entitas yang dibentuk oleh negara dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Fungsi utamanya tidak sekadar menyediakan pelayanan dasar, tetapi juga mendukung pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan budaya agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Berbeda dengan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan, organisasi publik menitikberatkan pada kepentingan umum, kesejahteraan kolektif, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Fokusnya terletak pada pemerataan layanan, keadilan sosial, serta penciptaan legitimasi negara di mata rakyat.

Lebih jauh, organisasi publik tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif yang mengatur jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen politik dan sosial yang menjembatani interaksi antara negara dengan masyarakat. Keberadaannya mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjawab kebutuhan publik, sekaligus menjadi arena di mana kepentingan pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi, bernegosiasi, bahkan terkadang berkonflik. Dengan demikian, organisasi publik merupakan ruang dinamis yang terus bergerak sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan warga, dan perubahan kebijakan.

Selain sebagai penyedia layanan, organisasi publik juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan publik yang buruk dapat menimbulkan kekecewaan, menurunkan legitimasi, bahkan memicu krisis kepercayaan. Sebaliknya, pelayanan yang efektif, transparan, dan merata akan memperkuat legitimasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong terbentuknya hubungan timbal balik yang sehat antara pemerintah dan warga negara. Karena itu, organisasi publik memikul

DAFTAR PUSTAKA

- Maqdiyan, R., & Setiawan, D. (2023). Antecedents and consequences of public sector organizational innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(1): 100042.
- Marreiros, S. I. (2023). The impact of organizational culture on public sector effectiveness and innovation. *Management Research and Practice*.
- Al-Azkiya, M. E., Sudarmo, S., & Ansoriyah, F. (2024). Organizational culture and adaptability in public sector organizations: bibliometric analysis and literature review. *E3S Web of Conferences*.
- Abawari, A. M. (2024). The effects of organizational culture on change management strategies in public organizations. *Journal of Change Management*.
- Ren, L., Deng, S., & Men, L. (2025). A study on factors shaping innovative work behavior and service innovation performance in government sectors: role of digital leadership and dynamic capabilities. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12: 1076 (2025)
- Ihyauddin et al. (2025). Organizational culture transformation in the New Public Management era: case study in Indonesian local government. *Journal of Social Knowledge and Education*.
- Borrás, S. (2024). The transformative capacity of public sector organisations. *Research Article on Public Sector Transformation*.
- Sabela, O. I., & Etikariena, A. (2025). Driving Indonesian public sector innovation with strength-based leadership: the moderating role of ambidextrous organizational culture. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 20(1), April 2025
- Lambelanova, R. (2024). The role of government communication policies in fostering innovation resilience in the science sector. *JECS*.
- OECD (2020). Embracing innovation in government: global trends. *OECD Reports* dikenal dan terindeks Google Scholar.



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 5: MANAJEMEN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Haerana, S.Sos

Universitas Muhammadiyah Makassar

BAB 5

MANAJEMEN DALAM

ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Administrasi publik merujuk kepada bagaimana pemerintah merancang pengelolaan sumber daya yang dimiliki, menyusun kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dan juga bagaimana penyelenggaraan layanan kepada warga negara. Pada intinya administrasi publik tidak hanya dikategorikan sesuatu yang bersifat teknis tetapi merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya menjamin terlaksananya kebijakan publik dengan baik sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara maksimal.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman yang lengkap dan terstruktur mengenai bagaimana prinsip-prinsip manajemen diterapkan dalam administrasi publik. Pembahasan dimulai dari fungsi manajemen publik yang menjadi kerangka dasar: mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efisien, pengarahan yang jelas, hingga pengawasan yang ketat dan berorientasi pada akuntabilitas.

Pada sub bab Fungsi Manajemen Publik, pembaca akan diperkenalkan pada empat pilar utama manajemen—perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan—yang menjadi rangkaian yang saling terpaut satu sama lain dalam penyelenggaraan program di pemerintahan. Sehingga akan memberikan memberikan gambaran keterhubungan antar fungsi dan pada akhirnya menjadi komponen manajerial yang efektif.

Selanjutnya, Proses Perencanaan akan membahas bagaimana pemerintah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran secara sistematis. Proses ini mencakup analisis lingkungan, penentuan prioritas, dan penyusunan rencana strategis maupun operasional. Perencanaan yang baik adalah pondasi keberhasilan setiap program, sehingga materi ini disusun untuk memberikan panduan logis dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, S., & Alshammari, F. (2020). *Strategic planning in public organizations: A case study analysis*. Journal of Public Administration and Governance, 10(1), 45–62.
- Andrews, R., Boyne, G. A., & Walker, R. M. (2016). *Strategic management and public service performance*. Public Management Review, 18(5), 651–673.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2018). *Managing performance: International comparisons*. London: Routledge.
- Brown, A., Jones, P., & Smith, L. (2020). *Leadership in public sector organizations: Transformational strategies in practice*. Public Administration Review, 80(5), 822–834.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
- Fernandez, S., & Rainey, H. G. (2017). *Managing successful organizational change in the public sector*. Public Administration Review, 67(2), 168–176.
- Gulick, L., & Urwick, L. (1937). *Papers on the science of administration*. New York: Institute of Public Administration.
- Haerana. (2021). *Dinamika administrasi publik: Modernisasi, digitalisasi, dan tantangan birokrasi*. Jakarta: Mitra Cendekia Media.
- Janssen, M., van der Voort, H., & Wahyudi, S. (2021). *Co-creation and new public governance: Lessons from digital-era innovations in the public sector*. International Review of Administrative Sciences, 87(2), 434–449.
- Mintzberg, H. (2015). *Organization design: Fashion or fit?* Cambridge, MA: Harvard Business Review Press.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (2014). *Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management* (3rd ed.). New York: Free Press.
- Moynehan, D. P. (2017). *Introduction to public administration: A practical guide*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Nurkholifah, S. (2022). *Pengembangan SDM publik melalui pembelajaran inisiasi internal dan mentoring*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45–60.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Talbot, C. (2015). *Theories of performance: Organizational and service improvement in the public domain*. Oxford: Oxford University Press.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Wright, B. E. (2015). *Reintegrating POSDCORB: A contemporary perspective on Urwick and Gulick's structure of public administration*. Public Administration Quarterly, 39(3), 515–541.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Boston: Pearson.



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 6: KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Frederikus Antonius Mana, S.Fil., M.PA

Universitas Musamus

BAB 6

KEPEMIMPINAN

DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam administrasi publik merupakan elemen vital yang menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk memimpin organisasi publik guna mencapai tujuan bersama yang melayani kepentingan publik secara efektif (Sutangsa, 2023). Kepemimpinan yang efektif dalam sektor publik berperan sebagai pendorong utama bagi tercapainya tujuan-tujuan sosial dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini, peran pemimpin publik sangat strategis karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan tetapi juga sebagai motivator yang menggerakkan seluruh aparatur negara untuk bekerja secara maksimal (Fitriani, 2007). Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, tantangan dalam administrasi publik semakin kompleks. Di era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang pesat ini, pemimpin sektor publik dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola informasi, menjaga transparansi, serta beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, paradigma kepemimpinan dalam administrasi publik pun harus berevolusi. Paradigma lama yang lebih mengutamakan birokrasi dan kekuasaan formal kini mulai bergeser ke arah kepemimpinan yang lebih humanis, demokratis, dan transformasional.

Kepemimpinan transformasional dalam administrasi publik adalah sebuah pendekatan yang mengutamakan perubahan positif baik di level individu maupun organisasi. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga berupaya menciptakan perubahan yang berkelanjutan dengan menginspirasi bawahannya untuk bekerja dengan visi yang lebih besar, mengutamakan integritas, serta

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformatif dan Transaksional dengan Kinerja (The Effect Transactional-Transformational Leadership Style Perception and Performance). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 178–187.
- Basuki, J. (2021). Tantangan Ilmu Administrasi Publik: Paradigma Baru Kepemimpinan Aparatur Negara. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 160–181. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.160-181>
- Fanani, A. F., Iqbal, M. M., Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan Transformatif Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p84-90>
- Fitriani, L. (2007). KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN DALAM ORGANISASI PUBLIK Leadership and Services within Public Organizations. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 396–404.
- Hanum, N. A., Fitriyah, A., & Sumarsono, R. B. (2019). Pandangan Konsep Kepemimpinan Kharismatik. *Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 163–170. <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Nur-Amaliyah-Hanum.pdf>
- Insan, A. N. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Transaksional terhadap Motivasi Intrinsik, Work Engagement, dan Kinerja Karyawan. *Journal of Business Studies*, 2(1), 1–18. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/jbsuta/article/view/782>
- Lona Chinsia Alfattama, & Andiko Sri Kuncoro. (2023). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otokratis, Demokratik Dan Laissez Faire Terhadap Peningkatan Kinerja Perangkat Desa. *BEMJ: Business, Entrepreneurship, and Management Journal*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.36563/bemj.v2i1.731>

- Mana, F. A., Prasetya, M. N., & Merauke, U. M. (2022). *EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF SERVICE IN BIRTH MAKING*. 2(7), 239–255.
- Marginingsih, R. (2016). Kepemimpinan karismatik sebagai employer branding. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(2), 32–51.
- Murtiningsih, R. S. (2020). Implikasi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Kinerja Karyawan. *Media Riset Bisnis & Manajemen*, 20(1), 15–28. <https://doi.org/10.25105/mrbm.v20i1.6324>
- Nurhalim, N., Saputra, M. Z. A., Ningsih, N. S., Amirullah, A., Musli, M., & Jamrizal, J. (2023). Konsep Kepemimpinan: Pengertian, Peran, Urgensi dan Profil Kepemimpinan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2071–2072.
- Siswatiningsih, I., Raharjo, K., & Prasetya, A. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Transaksional Terhadap Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Komitmen Oganisasional Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2388>
- Sofiah Sinaga, N., Aprilinda, D., & Putra Budiman, A. (2021). Konsep Kepemimpinan Transformasional. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 840–846. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i7.123>
- Sutangsa. (2023). Konsep Kepemimpinan Transformasional. *5+WPJ, Volume 5 Issue 2*, 111–112. <https://doi.org/http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Wardani, A. K. (2019). Urgensi Inovasi Pelayanan Bidang Administrasi Publik di Era Disrupsi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 30–35. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2258%0Ahttps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/2258/2021>



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 7: ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Cataryn V. Adam, S.Sos, M.Si

Universitas Nusa Cendana

BAB 7

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

A. PENTINGNYA ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Etika dalam pelayanan publik merujuk pada prinsip-prinsip moral yang harus di pegang oleh individu dan entitas yang terlibat dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang di berikan tidak saja efektif maupun efisien tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang menjadi dasar bagi kepercayaan publik, pemerintah serta institusi publik. Salah satu aspek fundamental yang penting terkait etika dalam pelayanan publik adalah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban, agar pelayanan publik dapat di percaya oleh masyarakat sebagai penerima layanan publik. Di era digitalisasi di Indonesia saat ini masyarakat menginginkan pelayanan prima serta berinovasi lebih efisien dan efektif agar di terima oleh masyarakat luas(Tambotoh & Gaol, 2023). Pelayanan publik yang optimal di arahkan kepada berbagai elemen masyarakat.Oleh karena itu etika dalam pelayanan publik harus menggambarkan prinsip-prinsip sosial yang lebih luas termasuk keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Rini,2023). Pelayanan publik tidak sekedar pelayanan barang atau jasa oleh pemerintah tetapi juga berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itu sendiri. Kompleksitas pelayanan yang di berikan harus di dorong oleh sikap profesional yang membuat pemberi layanan harus bertindak sesuai kode etik yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah, di mana sebagai administrator publik harus bertanggungjawab dalam kebijakan dan tindakan terkait pelayanan publik kepada masyarakat. UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menetapkan standar perilaku bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan yang mencakup keadilan, kecermatan, kesantunan, profesional dan transparansi. Hal ini berkaitan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, (2025). *Etika Pelayanan Publik*, Penerbit CV Cahaya Bintang Cemerlang
- Caiden, G. E. (1991). What Really Is Public Maladministration? *Public Administration Review*, 51(6), 486. <https://doi.org/10.2307/976599>
- Cooper, T. (2019). *Handbook of Administrative Ethics*. CRC Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015).
- Darwin, Muhajir. 1995. *Dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Denhardt, KG. 1988. *The ethics of public service: resolving moral dilemmas in the public organizations*. New York: Greenwood Press.
- Edwin, Flipppo. 1983. *Administrative Responsibility dalam Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro, Modern Public Administration, terjemahan DS. Widodo*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Joko, Widodo. 2001. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- The Liang Gie. 2006. *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- THE NEW PUBLIC SERVICE: Serving Rather than Steering. *The Age of Direct Citizen Participation*, 60(6), 63–77. Fejzullahu, A., & Batalli, M. (2019). The role of ethics in public administration. *SEER: Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe*, 22(2), 267–278. <https://www.jstor.org/stable/27096120>
- Frederickson H. G. & Ghere R. K. (2013). *Ethics in public management* (Second). M.E. Sharpe.
- Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 109(2), 142–155. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003>
- Grimmelikhuisen, S., & Klijn, A. (2015). The Effects of
- Judicial Transparency on Public Trust: Evidence From A Field Experiment. *Public Administration*, 93(4), 995–1011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/padm.1214> 9328

Kridawati Sadhana, 2010 Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Penerbit Citra Malang.

Sedarmayanti, 2013 Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Penerbit Refika Aditama

Wahyudi, Kumorotomo. 1992. Etika Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafinda Persada.

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 8: REFORMASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.

Universitas Wijaya Putra

BAB 8

REFORMASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

A. PENDAHULUAN

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam menghadapi dinamika global, tuntutan demokratisasi, dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Di berbagai negara, reformasi administrasi publik menjadi respons terhadap persoalan-persoalan mendasar dalam birokrasi seperti inefisiensi, korupsi, rendahnya akuntabilitas, dan lemahnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Konteks Indonesia sendiri menunjukkan bahwa gelombang reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 tidak hanya bersifat politik, tetapi juga berdampak besar pada aspek kelembagaan, regulasi, dan tata kelola administrasi publik. Reformasi birokrasi pun dikembangkan sebagai bagian dari agenda strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, responsif, dan terbuka (Kementerian PANRB, 2021).

Dalam kerangka reformasi tersebut, konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi landasan utama untuk mengarahkan perubahan sistemik dalam penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum tidak hanya menjadi norma-norma etis, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan reformasi administrasi (United Nations Development Programme [UNDP], 2022). Berbagai studi menegaskan bahwa implementasi *good governance* berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik, penguatan institusi demokrasi, dan percepatan pembangunan yang inklusif (World Bank, 2023).

Namun demikian, reformasi tata kelola tidak hanya sebatas pada perubahan struktural dan prosedural. Esensinya terletak pada upaya untuk membangun budaya pemerintahan yang menempatkan kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2021). Pedoman pelaksanaan Musrenbang partisipatif berbasis teknologi informasi. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2022). Pedoman pelaksanaan Musrenbang: Memperkuat peran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- BPKP. (2022). Laporan tahunan pengawasan intern nasional. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Grindle, M. S. (2017). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 35(1), 159–174. <https://doi.org/10.1111/dpr.12260>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hughes, O. E. (2012). *Public management and administration: An introduction* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2021). *Grand design reformasi birokrasi 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). *Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2021*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). *Laporan tahunan keterbukaan informasi publik*. <https://komisiinformasi.go.id>
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3, 475–507. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Meuleman, L. (2021). *Metagovernance for sustainability: A framework for implementing the SDGs*. Routledge.
- OECD. (2020). *Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave*. <https://doi.org/10.1787/339306da-en>
- OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. <https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-22214399.htm>
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Peixoto, T., & Sifry, M. L. (Eds.). (2017). *Civic tech in the global south: Assessing technology for the public good*. World Bank.
- Peters, B. G. (2010). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (6th ed.). Routledge.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis – Into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- United Nations Development Programme. (2022). *Governance for sustainable development: Integrating governance in the post-2015 development framework*. <https://www.undp.org>

- United Nations Development Programme. (2022). Governance for sustainable development: Integrating governance in the 2030 Agenda. <https://www.undp.org/publications/governance-sustainable-development>
- Wampler, B., & Hart, D. M. (2020). Participation, transparency, and accountability: Innovations in governance in the Global South. *Public Administration and Development*, 40(2), 73–83. <https://doi.org/10.1002/pad.1881>
- World Bank. (2023). Worldwide governance indicators. <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Bank. (2023). Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/publication/enhancing-government-effectiveness-and-transparency-the-fight-against-corruption>



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK BAB 9: ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si.

Universitas Nusa Cendana

BAB 9

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 angka 7 tentang Keuangan Negara, anggaran sektor publik diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan yang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Allen Schick (2009), proses penganggaran adalah rekonsiliasi di mana Pemerintah, Parlemen, dan masyarakat terlibat dalam diskusi tentang keunggulan dari berbagai opsi kebijakan serta metode pengalokasian sumber daya yang ada. Penganggaran juga berfungsi untuk mengatur tindakan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan bantuan serta layanan kepada masyarakat, di samping pencatatan, akuntabilitas penggunaan dana publik dan hasil yang diperoleh. Definisi-definisi tersebut memperkuat pemahaman bahwa anggaran merupakan sebuah proses politik di mana semua pihak berkontribusi dalam pengalokasian dana publik untuk mendukung kepentingan masyarakat (Anggaran & Perbendaharaan, n.d.).

Menurut Mardiasmo (2018), anggaran sektor publik memainkan peran yang signifikan dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Anggaran berfungsi sebagai sarana bagi Lembaga pemerintah untuk memberikan arahan dalam mendorong berbagai pembangunan di bidang sosial ekonomi, serta untuk memastikan keberlanjutan dan meningkatkan kualitas hidup warga suatu negara.
2. Anggaran sangat diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas serta senantiasa berkembang, sementara di sisi lain, sumber daya yang tersedia sangatlah terbatas. Jelas bahwa anggaran menjadi penting karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, dkk. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Anggaran, P., & Perbendaharaan, D. (n.d.). *PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK: TEORI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA* ADITYA AGUNG SATRIO WIDYAIWARA AHLI PERTAMA.
- Aprianti, E. R., & Riharjo, I. B. (2017). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA INSTANSI PEMERINTAH . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.
- Barbara S Romzek, & Melvin J Dubnick. (2000). *Dynamics of Public Sector Accountability in Era of Reform*. International Review of Administrative Sciences.
- Beckett-Camarata, J. (2007). *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (E. Berman, Ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1081/e-epap2>
- BPK RI. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan dan Kinerja*.
- Gani, F. S., Pananrangi, A. R., Ismail, I., Provinsi, D. S., & Selatan, S. (2022). The Effect of Commitment, HR, Supervision on the Implementation of Performance-Based Budget in Social Service Department, South Sulawesi Province. In *J. Paradigma Administrasi Negara* (Vol. 4, Issue 2).
- Gatti, S. (2012). *Pembiayaan Proyek dalam Teori dan Praktik: Merancang, Menata, dan Membiayai Proyek Swasta dan Publik*. Waltham, MA : Elsevier.
- Grönlund, A., Svärdsten, F., & Öhman, P. (2011). Value for money and the rule of law: the (new) performance audit in Sweden. *International Journal of Public Sector Management*, 24(2), 107–121. <https://doi.org/10.1108/09513551111109026>
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

- James S Bowman. (2010). *Achieving Competencies in Public Service* (second). Armonk N.Y:M.E Sharpe.
- Jimenez, B. S., & Pagano, M. A. (2012). What Factors Affect Management Quality? State Infrastructure Management and the Government Performance Project. *Public Works Management & Policy*, 17(2), 124–151. <https://doi.org/10.1177/1087724X11419308>
- Kernaghan, K. (1993). Partnership and public administration: conceptual and practical considerations. *Canadian Public Administration*, 36(1), 57–76. <https://doi.org/10.1111/j.1754-7121.1993.tb02166.x>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). ANDI.
- Marshall Edward Dimock, & Gladys Ogden Dimock. (1969). *Public Administration*. Rineka Cipta.
- Perrin_-_Implementing_the_Vision*. (n.d.).
- R.D. Behn, & P.A Kant. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Retnowati, E. (2012). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN). *Perspektif*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>
- Seger, M. S. D. (2022). Bureaucratic Accountability In The Management of The Operational Fund School (BOS) (Case Study On Elementary Education Kupang). *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(4), 504–513. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i4.1039>
- Seger, M. S. D. (2025). Etika dan Transparansi dalam Pemerintahan Daerah. In *Sistem Pemerintahan Daerah* (pp. 278–292). Widina Media Utama.
- Shim, J. K., & Siegel, J. G. (n.d.). *Budgeting Basics and Beyond SECOND EDITION*.
- Srithongrung, A., Yusuf, J.-E. (Wie), & Kriz, K. A. (2019). *A Systematic Public Capital Management and Budgeting Process* (pp. 1–22). <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7329-6.ch001>

- Westerman, N. , & C. J. P. (2007). *Cost estimation and budgeting. Capital project planning and evaluation: Expanding the role of the finance officer* (Vol. 8).
- Yosef, B. E. (2024). The art of effective oversight: unravelling the success of Israel's Cabel Inquiry Committee. *The Theory and Practice of Legislation*, 12(1), 21–54.
<https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2310473>



PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

BAB 10: ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

BAB 10

ADMINISTRASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi publik telah muncul sebagai strategi penting dalam memodernisasi tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta menjawab ekspektasi masyarakat yang terus berkembang di era digital. Berbagai studi menyoroti dampak transformatif dari teknologi digital terhadap pemerintahan publik di berbagai kawasan, dengan menekankan baik peluang maupun tantangan yang menyertai proses transisi ini. Salah satu manfaat utama dari transformasi digital adalah potensi peningkatan efisiensi dalam proses administrasi publik, sebagaimana dibuktikan oleh beragam studi kasus. Sebagai contoh, di Jerman, reformasi besar-besaran yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi telah mendorong digitalisasi berbagai layanan publik, meskipun upaya modernisasi tersebut mengalami hambatan akibat sistem warisan yang sudah usang (Mergel, 2021). Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memanfaatkan inovasi digital guna meningkatkan kualitas layanan, yang menjadi contoh nyata penerapan alat digital dalam reformasi sektor publik (Magna & Maulana, 2022). Temuan ini sejalan dengan perkembangan internasional, di mana integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan big data telah mengubah model pelayanan publik dan implementasi kebijakan (Saxena, 2021; Mendonça et al., 2023).

Namun demikian, transisi menuju digitalisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Ketimpangan akses terhadap teknologi dapat menimbulkan eksklusi digital, yang secara tidak proporsional berdampak pada kelompok masyarakat yang terpinggirkan (Duarte, 2021; Ranchordás, 2022). Studi menunjukkan, bahkan di negara-negara maju secara teknologi, masih terdapat kesenjangan dalam kompetensi digital dan infrastruktur, yang membatasi tercapainya tujuan transformasi digital secara

DAFTAR PUSTAKA

- Agostino, D., Arnaboldi, M., & Lema, M. (2020). New Development: Covid-19 as an Accelerator of Digital Transformation in Public Service Delivery. *Public Money & Management*, 41(1), 69-72. <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1764206>
- Akman, C. I., Akman, E., & Okçu, M. (2021). Turkey's open data policy. *Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations*, 13-35. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4978-0.ch002>
- Anguche, C., Kimani, H., & Ndururi, J. (2024). E-Government Services and Performance of County Governments in Kenya: The Case of Nairobi City County. *European Journal of Business and Strategic Management*, 9(3), 1-30. <https://doi.org/10.47604/ejbsm.2796>
- Batool, S., Gill, S., Javaid, S., & Khan, A. (2021). Good Governance Via E-Governance: Moving Towards Digitalization For a Digital Economy. *Review of Applied Management and Social Sciences*, 4(4), 823-836. <https://doi.org/10.47067/ramss.v4i4.186>
- Belyaevskaya-Plotnik, L. (2024). Threats to National Security in The Context of Digital Transformation of The Economy and Public Administration. *The Geo-Economic Landscape : A Market and Social Approach*, 180-197. <https://doi.org/10.59954/qgrl7430-7>
- Bojang, M. (2021). Public Value Management: an Emerging Paradigm in Public Administration. *International Journal of Business Management and Economics*, 2(4), 225-238. <https://doi.org/10.47747/ijbme.v2i4.395>
- Bondarenko, C., Liganenko, I., & Mykytenko, D. (2020). Transformation of Public Administration in Digital Conditions: World Experience, Prospects of Ukraine. *Journal of Scientific Papers Social Development & Security*, 10(2), 76-89. <https://doi.org/10.33445/sds.2020.10.2.9>

- Danu, D., Supardi, S., Sutanto, S., & Riko, R. (2023). E-Services: Implementation of Digital-Based Public Services in The 4.0 Era. *Athena Journal of Social Culture and Society*, 1(3), 87-92. <https://doi.org/10.58905/athena.v1i3.40>
- Denisov, Y. and Nemtsova, N. (2021). Transformation of The Ethics of Public Authority in The Context of Changing Paradigms of Public Administration. *SHS Web of Conferences*, 101, 02017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110102017>
- Destiana, R. (2023). Kepemimpinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i1.15762>
- Duarte, M. X. (2021). Digital Transformation In Local Administration. *Digital Transformation and Challenges to Data Security and Privacy*, 395-409. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4201-9.ch023>
- Dzvinchuk, D., Borshch, H., Tsygrylyk, N., Dobosh, Z., & Dziubynska, O. (2022). Public Management for Sustainable Development: Current Challenges and Future Trends. *Cuestiones Políticas*, 40(73), 741-753. <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4073.42>
- Edelmann, N. and Mergel, I. (2022). The Implementation of a Digital Strategy in The Austrian Public Sector. *DG.O 2022: The 23rd Annual International Conference on Digital Government Research*, 391-399. <https://doi.org/10.1145/3543434.3543640>
- Edward, A., Adnan, M., & Khaidir, A. (2024). New Public Manajemen: Studi Kasus Penerapan New Public Manajemen Dalam Organisasi Publik di Indonesia. *future*, 2(2), 54-62. <https://doi.org/10.61579/future.v2i2.97>
- Faruq, M., Wardiyanto, B., Umpain, S., & Toyib, M. (2024). Collaboration of Stakeholders and AI in The Implementation of New Public Service in The Digital Era. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 5(1), 63-70. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v5i1.656>
- OECD (2023). Digital Government Review of Romania: Towards a Digitally Mature Government. *OECD Digital Government Studies*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/68361e0d-en>

- Garayová, L. (2021). E-Government : Shaping Europe's Digital Future. *Institutiones Administrationis*, 1(2), 16-24. <https://doi.org/10.54201/iajas.v1i2.19>
- Gebrihet, H. and Pillay, P. (2021). Emerging Challenges and Prospects of Digital Transformation and Stakeholders Integration in Urban Land Administration in Ethiopia. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 13(3), 341-356. <https://doi.org/10.1177/097491012111034097>
- Grabowska, M. (2024). Cyfryzacja administracji publicznej w unii europejskiej w świetle berlin declaration on digital society and value-based digital government, 2020. *E-Administracja: Wyzwania Dla Cyfrowych Usług Publicznych W Unii Europejskiej*, 29-44. <https://doi.org/10.12797/9788383680255.02>
- Hamsyah, A. (2023). Bureaucratic Reform Based On E-Procurement: Opportunities And Challenges. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14101>
- Hening, P. and Kumara, G. H. (2019). Public Sector Transformation In The Digital Age: Obstacles and Challenges for The Government of Indonesia. *IAPA Proceedings Conference*, 75-87. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.223>
- Herowandi, M. (2022). E-Governance Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 19(2), 22-33. <https://doi.org/10.56681/da.v19i2.60>
- Huque, A. and Ferdous, J. (2024). Electronic Public Service Delivery: Progress and Challenges in Bangladesh. *Public Administration and Policy*, 27(1), 19-30. <https://doi.org/10.1108/pap-06-2023-0090>
- Imanbekova, A., Fyliuk, H., & Stavbunik, Y. (2024). Some Aspects of Digitalization on Public Administration. *Bulletin of the Karaganda University Economy Series*, 11329(1), 45-54. <https://doi.org/10.31489/2024ec1/45-54>
- Kalalo, E., Putri, I., Mariana, L., & Arifin, A. (2024). The Influence of Public Administration Science Paradigm Shift in Its Realization Good Governance. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (Jisop)*, 5(2), 171-178. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.20185>

- Kalinichenko, O. A. (2024). Digitization In Public Administration In Ukraine: Opportunities And Challenges. *Digital Transformation in Ukraine: AI, Metaverse, and Society 5.0*, 193-204. <https://doi.org/10.69635/978-1-0690482-1-9-ch27>
- Karim, M. and Hosen, S. (2023). Implementation Challenges of ICT in The Public Sector in Upazila Region of Bangladesh: an Empirical Study. *Vidyodaya Journal of Management*, 9(I). <https://doi.org/10.31357/vjm.v9i1.6376>
- Khromova, Y. (2023). Digitalization Of Public Administration In Ukraine: Current Challenges And Synergic Effect. *Theoretical and Practical Aspects of Science Development*. <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-355-2-16>
- Kormych, L., Краснопольська, Т., & Zavhorodnia, Y. (2024). Digital Transformation and National Security Ensuring. *European Political and Law Discourse*, 11(1), 29-37. <https://doi.org/10.46340/eppd.2024.11.1.4>
- Korzh, I. (2024). Law In The Context Of Social And Digital Transformation. *Digital Transformation in Ukraine: AI, Metaverse, and Society 5.0*, 106-110. <https://doi.org/10.69635/978-1-0690482-1-9-ch11>
- Labaki, G. (2022). Innovation In Public Administration In The Digital Age: Toward A Change Of Paradigms / նորարարությունը թվային դարաշրջանում հանրային կառավարման ոլորտում. դեպի հարացույցերի փոփոխություն. *Armenian Journal of Public Administration / Հանրային Կառավարում*, 17-30. <https://doi.org/10.55490/18290167-2022.1-17>
- Lestari, U., Hamzah, A., & Sholeh, M. (2022). Sosialisasi Fenomena Cyber Crime dan Penanggulangannya Bagi Pengelola Informasi Publik Kapanewon Mlati Sleman Yogyakarta. *Near Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 100-106. <https://doi.org/10.32877/nr.v1i2.432>
- Lindgren, I. and Veenstra, A. F. v. (2018). Digital Government Transformation. *Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age*, 1-6. <https://doi.org/10.1145/3209281.3209302>

- Lindquist, E. A. (2022). The Digital Era and Public Sector Reforms: Transformation or New Tools For Competing Values? *Canadian Public Administration-Administration Publique Du Canada*, 65(3), 547–568. <https://doi.org/10.1111/capa.12493>
- Looks, H., Fangmann, J., Thomaschewski, J., & Schön, E. (2021). Towards a process model for agile transformation in e-government projects. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 6(1), em0132. <https://doi.org/10.29333/jisem/9571>
- Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., O’Gorman, C. (2022). Digital Public Services. In: Digital Towns. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-91247-5_3
- Madaki, A., Ahmad, K., & Singh, D. (2024). It Integration Implementation in E-Government Public Sector in Developing Countries: A Systematic Literature Review And Model Development. *Transforming Government People Process and Policy*, 18(3), 451-472. <https://doi.org/10.1108/tg-02-2024-0043>
- Magna, M. and Maulana, M. (2022). Managing Digital Innovation as Public Sector Transformation Strategy: a Case Study in Office of Population and Civil Registration Klaten Regency., 14-28. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-53-4_3
- Maharani, H. and Ulfa, M. (2022). Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web Mobile. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 136-141. <https://doi.org/10.37034/jidt.v4i3.212>
- Mainda, G. and Sulle, A. (2024). The Roles of E-Government on Effective Services Delivery in The Health Sector: a Case of Muhimbili Referral Hospital, Tanzania. *African Journal of Empirical Research*, 5(3), 588-604. <https://doi.org/10.51867/ajernet.5.3.51>
- Mao, Z., Zhu, X., Zou, Q., & Wen, J. (2024). How Can Digital Villages Improve Basic Public Services Delivery in Rural Areas? Evidence From 1840 Counties in China. *Agriculture*, 14(10), 1802. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101802>

- Maschuroh, A. and Priono, H. (2021). Evaluasi Kinerja Reformasi Akuntansi Sektor Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Pendekatan Kualitatif. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 460-468. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1887>
- Maulana, R. (2023). Digital Government Transformation in Slovenia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), 125. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45442>
- Maulana, R. and Dečman, M. (2023). Collaborative Governance in The Digital Transformation Age: a Systematic Literature Review With Bibliometric Mapping. *Central European Public Administration Review*, 21(1), 31-60. <https://doi.org/10.17573/cepar.2023.1.02>
- Mayasari, R., Heryana, N., & Hananto, A. (2023). Village Government Readiness Toward The Adoption of E-Government. *Buana Information Technology and Computer Sciences (BIT and CS)*, 4(1), 6-10. <https://doi.org/10.36805/bit-cs.v4i1.3241>
- Mayasiana, N. A., Prayitno, H., Heliastuti, S. B., & Wahyudi, E. (2024). Citizen Power as A Sustainable Transformation of Population Services. *Revista De Gestão - RGSA*, 18(9), e5737. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-016>
- Mendonça, R. F., Filgueiras, F., & Almeida, V. (2023). Redesigning Governments Through Algorithmic Systems. In *Algorithmic Institutionalism: The Changing Rules of Social and Political Life* (online ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870070.003.0005>
- Mergel, I. (2021). Digital Transformation of the German State. In: Kuhlmann, S., Proeller, I., Schimanke, D., Ziekow, J. (eds) *Public Administration in Germany. Governance and Public Management*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_19
- Molobela, T. and Uwizeyimana, D. (2023). E-Governance as a New Public Administration Paradigm: a Rhetoric or Reality?. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 12(8), 348-356. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i8.2931>

- Moloto, A. and Muchie, M. (2023). Factors That Affect The Effective Use of E-Government Procedures in Limpopo. *Journal Of Service Science And Management*, 16(03), 221-248. <https://doi.org/10.4236/jssm.2023.163013>
- Mulyani, S. (2024). Exploring Public Leadership Transformation for Public Service in the Digital Age: A Brief Appraisal. *Journal of Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*, 9(4). <https://doi.org/10.31506/jog.v9i4.30174>
- Nesti, G. (2018). Defining and Assessing The Transformational Nature of Smart City Governance: Insights From Four European Cases. *International Review of Administrative Sciences*, 86(1), 20-37. <https://doi.org/10.1177/0020852318757063>
- Nurfadilah, A., & Haliah, H. (2024). Public Sector Transformation: Increased Efficiency and Innovation in the Digital Economy. *International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences*, 2(2), 127-143. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v2i2.2870>
- Panjaitan, F., Saputra, R., Purnamasari, S., Kusmindari, C., & Agustini, E. (2023). Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Menggunakan Metode Web Qual 4.0 Dan Importance Performance Analysis. *Jurnal Perangkat Lunak*, 5(2), 74-85. <https://doi.org/10.32520/jupel.v5i2.2539>
- Pradani, F. and Eprilianto, D. (2023). Inovasi Aplikasi Satu Hari Jadi (Sahaja) Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. *Publika*, 2533-2546. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2533-2546>
- Provost, C. (2022). *Digital Government* (pp. 122–146). Oxford University Press eBooks. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198831471.003.0006>
- Ramakrishnan, S., Wong, M., Chit, M., & Mutum, D. (2022). a Conceptual Model of The Relationship Between Organisational Intelligence Traits and Digital Government Service Quality: The Role Of Occupational Stress. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 39(6), 1429-1452. <https://doi.org/10.1108/ijqrm-10-2021-0371>

- Ranchordás, S. (2022). The Digitization Of Government and Digital Exclusion: Setting The Scene. Law, Governance and Technology Series, 125-148. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07377-9_7
- Salsabila, T., Indrawati, T., & Fitrie, R. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik Melalui Kecerdasan Buatan. PJISE, 1(2), 21. <https://doi.org/10.47134/pjise.v1i2.2401>
- Saxena, D. (2021). Big Data for Digital Transformation of Public Services. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage, 250-266. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8583-2.ch013>
- Seno, R. (2022). New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik. Cakrawala, 16(1), 43-69. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v16i1.407>
- Shulz, S. (2024). Moving From Coproduction to Commonization of Digital Public Goods and Services. Public Administration Review, 85(1), 60-72. <https://doi.org/10.1111/puar.13795>
- Sidorenko, E. and Khisamova, Z. (2019). Private Partnership as a Global Trend of Digital Government. SHS Web of Conferences, 71, 01004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20197101004>
- Sudaryanto, A. and Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). Musamus Journal of Public Administration, 6(1), 513-521. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5402>
- Tambotoh, J. and Gaol, F.L. (2023). "Pemantauan Berkelanjutan Menggunakan Process Mining Pada Layanan Publik Digital", in Prosiding Use Cases Artificial Intelligence Indonesia: Embracing Collaboration for Research and Industrial Innovation in Artificial Intelligence, B. R. Trilaksono, H. Riza, A. Jarin, N. D. S. Darmayanti, and S. Liawatimena, Eds. Jakarta: Penerbit BRIN, Februari 2023, ch. 5, pp. 55-66, <https://doi.org/10.55981/brin.668.c539>
- Untoro, M., Kurniawansyah, A., Perdana, A., Praseptiawan, M., Nugroho, E., Afriansyah, A., ... & Verdiana, M. (2024). Digitalisasi Informasi Sebagai Penunjang Efektivitas Pelayanan Administrasi Koperasi Argo Mulyo Lestari. Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 121-133. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i2.4588>

- Vyas, P. H., Mathur, S. M. R., & Shukla, P. (2024). *Reviewing The Relationship Between E-Governance Services and Digital Citizen Experience*. In *Digital Transformation In The Customer Experience* (pp. 291–303). Apple Academic Press. <https://doi.org/10.1201/9781003560449-17>
- Wadesango, N., Jori, A., & Sitsha, L. (2023). The Impacts of E-Procurement on Cost Reduction: a Case of Gweru City Council. *Multidisciplinary Science Journal*, 5, 2023ss0317. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2023ss0317>
- Wani, A. and Parray, J. (2023). Rationalisation of The Durbar Move: a Step Towards Good Governance in Jammu and Kashmir. *Indian Journal of Public Administration*, 70(1), 140-157. <https://doi.org/10.1177/00195561231204609>
- Wibowo, N., Utomo, A., Antika, E., Gumilang, M., & Rosdiana, E. (2022). Pendampingan Pengembangan Aplikasi Layanan Terpadu Kelurahan Curah Grinting Kota Probolinggo Untuk Meningkatkan Layanan Kepada Masyarakat. *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 446-450. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i3.3391>
- Wihlborg, E. and Iacobaeus, H. (2023). Context Matters—Different Entrepreneurial Approaches Among Street-Level Bureaucrats Enhancing Digital Inclusion. *European Policy Analysis*, 9(4), 379-396. <https://doi.org/10.1002/epa2.1197>
- Wright, R. E. (2023). Electronic Government in Public Administration. *Naukovij Visnik Užgorods'kogo Nacional'nogo Universitetu*, 2(76), 36–40. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.2.5>
- Yerramsetti, S. (2019). Not Decided in The Kitchen! Technocracy and The Regulatory-Welfare Politics of India's Direct Benefits Transfer Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 87(4), 908-924. <https://doi.org/10.1177/0020852319873708>
- Yoraeni, A., Basri, H., & Puspasari, A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Mewujudkan Smart Village. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5). <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10655>

- Yunus, E., Hasanah, U., & Seda, F. (2023). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Kanal Website Go Digital (Godigi) Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Publik*, 17(01), 66-75. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.180>
- Zaeniah, Z., Muttaqin, Z., Samsumar, L., Budiamin, M., & Yusuf, M. (2022). Pelatihan Keterampilan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi bagi Perangkat Desa Pemepek. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1453-1458. <https://doi.org/10.47492/eamal.v2i2.1690>
- Zdjelar, R. and Kelemen, R. (2019). The Smart Cities Are Implemented: Are Citizens Also "Smart"? *Smart Cities and Regional Development (SCRD) Journal*, 3(1), 47-62. <https://doi.org/10.25019/scrd.v3i1.46>

GLOSARIUM

A

Administrasi adalah proses pengelolaan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Administrasi Publik adalah disiplin ilmu dan praktik yang berfokus pada pengelolaan pemerintahan, kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat.

Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban birokrasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.

ADM adalah singkatan dari Administrasi, yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi.

Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan hasil kerja kepada pihak terkait.

Akuntabilitas Politik adalah tanggung jawab organisasi publik kepada masyarakat dan lembaga politik atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

PROFIL PENULIS

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si



Kelahiran Jember. Pada tahun 2006 meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan Pemerintahan Daerah. Penulis saat ini aktif dalam Riset

Group “Institute maritime for studies” Universitas Jember dan menjadi Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Selain itu, menjadi pengurus Organisasi Profesi yaitu Indonesian Association Public Administration (IAPA) Jawa Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan beberapa buku referensi yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (2019) dan Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah (2021). Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si.



Penulis lahir di Klaten Jawa Tengah pada tahun 1975. Selepas lulus dari FKIP UNINUS tahun 2005, melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UNIGA dan menyelesaikan program magister (S2) tahun 2007. Pada tahun 2022, meraih gelar doktor (S3) dari Program Pascasarjana UNPAS. Selain itu, juga mengikuti berbagai pendidikan non-formal, di antaranya Diklat PIM IV

(2008), Diklat Bendahara Pengeluaran (2010), Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa (2011), Diklat Asessor Kompetensi Pemerintahan (2015), dan Sertifikasi Dosen (2020). Sejak tahun 1996 mengabdikan pada Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dan dari tahun 2018 hingga sekarang menjadi dosen tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.

Hilarius Wandan, S.Sos., M.Si.



Penulis Lahir di Desa Lauran, pada tanggal 9 Januari 1981. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Lelemuku Saumlaki yang terdaftar sejak tahun 2016 hingga sekarang. Penulis menamatkan studi pada jenjang Pendidikan Dasar yakni pada SD Nasional Katolik (NASKAT) 1 Santo Yoseph Lauran (tahun 1993), SMP Negeri 1 Saumlaki (tahun 1996), SMU Budhi Mulia Saumlaki (1999). Penulis menamatkan studi pada jenjang Pendidikan Starata Satu (S1) tahun 2008 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Langgur-Maluku Tenggara-Maluku, dan jenjang pendidikan Pascasarjana (Strata dua) dalam bidang ilmu Sosiologi pada Program Studi Sosiologi Universitas Pattimura Ambon-Maluku tahun 2015. Selain melakukan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penulis juga melakukan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal penelitian dengan standar nasional ber-ISSN. Penulis juga terlibat dalam penulisan buku kolaborasi Bersama dengan para penulis lainnya.

Dr. Desna Aromatica, M.AP



Dosen pada jurusan administrasi publik universitas andalas sejak tahun 2005. Menyelesaikan S1 pada tahun 2004 dan S2 pada tahun 2008 di universitas Brawijaya jurusan administrasi publik. S3 diselesaikan pada tahun 2019 pada jurusan administrasi publik universitas padjadjaran.

Dr. Haerana, S.Sos



Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Tamat S1 di Jurusan Administrasi Negara pada FISIPOL Universitas Hasanuddin; tamat pada program Akta IV di Universitas Negeri Makassar; tamat S2 pada Jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Negeri Makassar; tamat S3 pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar. Saat menjalani masa studi Program Doktor di Universitas Negeri Makassar berhasil mendapatkan Beasiswa pada Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) Tahun 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan negara tujuan Amerika Serikat (Northern Illinois University). Penulis telah berhasil terbitkan sebuah buku berjudul Manajemen Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan (2016). Buku referensi yang berjudul Dinamika Administrasi Publik (2021). Bookchapter : Ilmu Negara (2021). Bookchapter : Manajemen Sumber Daya Manusia (2022). Buku referensi dengan judul Manajemen Pelayanan Publik (2022). Buku Referensi : Pemberdayaan Masyarakat (2023). Bookchapter : Pengantar Administrasi Negara (2024). Bookchapter : Kajian Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (2024).

Frederikus Antonius Mana, S.Fil., M.PA



Penulis lahir di Nagekeo Flores pada 21 September 1987 anak kedua dari lima bersaudara. Menamatkan pendidikan SD pada SDK Penginanga Tahun 1999, melanjutkan pendidikan SLTP-SLTA pada SLTP-SLTA Seminari Menengah Sinar Buana Sumba Barat Daya dan lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikan S1 pada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan lulus pada Tahun 2013. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Administrasi Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada dan lulus pada Tahun 2016. Sejak tahun 2022 dan sampai saat ini menjadi dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Musamus Merauke. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul di antaranya: *Administrasi Kepegawaian*

Dr. Cataryn V. Adam, S.Sos., M.Si



Cataryn V. Adam adalah seorang akademisi yang mendalami latar belakang pendidikan Ilmu Administrasi Negara S1 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Nusa Cendana Kupang terkait Reformasi Birokrasi. Saat ini sebagai dosen pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Nusa Kupang, aktif dalam kegiatan tugas pengajaran, pengabdian maupun penelitian. Melalui tulisan ini ingin memberikan pencerahan dan kontribusi kepada administrator publik agar selalu menempatkan etika di dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan agar masyarakat atau publik merasa puas terhadap layanan yang di berikan oleh pemerintah secara efektif, efisien di era reformasi saat ini.

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.



Penulis lahir di Yogyakarta 9 Juni 1966. Pendidikan S1 Administrasi Negara dari Universitas Airlangga, Pendidikan S2 Human Resource Management dari Wollongong University Australia, Pendidikan S3 Administrasi Negara dari Fisipol UGM. Saat ini menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UWP, Pendiri dan Ketua Pusat Studi Gender dan Inklusi Sosial, Wakil Ketua Umum Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Bidang Pengembangan Kompetensi dan Profesi tahun 2021- sekarang, juga sebagai Direktur LSP Administrasi Publik Indonesia. Interest penelitian di bidang Kebijakan dan Manajemen Publik. Beberapa buku yang dihasilkan Manajemen Sektor Publik (2010); Dilema Diskresi Birokrasi (2011); Capacity Building Model: Penguatan kapasitas desa berbasis nilai kearifan lokal (2023), Kontributor buku: Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer (2009), Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik (2009), serta penyusun Modul Bahan Ajar Interaktif Universitas Terbuka Manajemen Pelayanan Publik (2024).

Marini Sari Dewi Seger, S.Sos., M.Si.



Penulis adalah seorang akademisi yang mendalami Ilmu Administrasi Negara dengan latar belakang pendidikan di Universitas Nusa Cendana, baik pada jenjang sarjana (S1) maupun magister (S2). Selama masa studinya, ia berfokus pada bidang-bidang utama dalam Administrasi Negara, termasuk Administrasi Pembangunan, Good Governance, Reformasi Birokrasi, pembangunan berkelanjutan dan human rights. Saat ini, Marini berprofesi sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana. Sebagai dosen, ia tidak hanya mengemban tugas pengajaran, juga aktif dalam kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kepakarannya dalam Administrasi Publik. Melalui tulisan ini, ia berupaya mengidentifikasi konsep keuangan publik dan solusi inovatif dalam pengawasan keuangan publik. Dengan pengalaman dan dedikasi yang tinggi, Marini Sari Dewi Seger berkomitmen untuk terus mengembangkan diri sebagai akademisi dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan generasi baru administrator publik yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan di era yang semakin kompleks ini.

Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si,



Daelami Ahmad, S.Ag, M.Si, lahir di Banyuwangi – Jawa Timur pada tanggal 10 Juli 1974. Tinggal di Kota Serang Provinsi Banten. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), Program Studi S2 Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta (2011), Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan (Suscadoswar) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) tahun 2000, Distance Learning Program Personalia Management - PPM Manajemen Jakarta (2001), dan Applied Approach (AA) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2006). Pengalaman kerja sebagai dosen tetap dan Kasubag Personalia di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAM I) Jakarta (1998-2003), Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Pandeglang (2003-2012), Ketua Sekolah

Tinggi Ilmu Administrasi Banten Pandeglang (2011-2013), Direktur LP3i Course Center Serang (2009-2014), Wakil Direktur Akademi Akuntansi Keuangan dan Perbankan Indonesia Serang (2010-2016), Wakil Ketua II STIKes Ichsan Medical Center Bintaro Tangerang Selatan (2016-2021), Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri (PPCM) Lebak-Banten (2021-sekarang), Wakil Direktur II Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada Tangerang (2022-2024), dan Wakil Rektor II Universitas Salakanagara (UNSAKA) di Tangerang (2024-sekarang). Pengalaman lain yang relevan dengan pendidikan sebagai Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV-B/ Banten (2009-2022), Sekretaris Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (BAPOMI) Provinsi Banten (2017-2021), Pengurus Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Wilayah Banten (2018-2023), Sekretaris Yayasan Ichtiar Kasih Anak Nusantara (2019-2021), Dewan Pendiri dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) tahun 2020 – sekarang, Tim Pendirian Universitas Ichsan Satya Jakarta (2019-2021), Tim Pendirian Universitas Dharma Indonesia (2021), Pengurus Yayasan Karya Bunda Husada (2022-2023), Pengurus Yayasan Bina Citra Wisata Bandung penyelenggara Akademi Pariwisata Nasional Indonesia Bandung (2022-sekarang), Tim Pendiri Universitas Salakanagara (2022-2024). Pengalaman lainnya di bidang bisnis dan manajemen sebagai Operation Manager PT Garuda Trading and Publishing Jakarta (2001-2003), Editorial Manager PT Lentera Abadi Jakarta (2003-2004), General Manager PT Sinergi Pustaka Indonesia Jakarta (2006-2007), Corporate HRD PT Grhamet Group (2019-2020).

Pengantar Ilmu **ADMINISTRASI PUBLIK**

Buku Pengantar Ilmu Administrasi Publik ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk memahami dasar-dasar, teori, serta praktik administrasi publik dalam konteks pemerintahan modern. Bab pertama membahas konsep dasar administrasi publik, mulai dari pengertian, sejarah perkembangan, ruang lingkup, hingga pentingnya administrasi publik sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemahaman ini menjadi fondasi untuk memasuki bab-bab berikutnya yang lebih mendalam. Pada bab kedua hingga bab keenam, pembahasan diarahkan pada kerangka teoretis dan praktis administrasi publik, meliputi teori klasik hingga kontemporer, birokrasi dan reformasinya, organisasi sektor publik, fungsi manajemen, serta gaya kepemimpinan yang relevan dalam konteks pelayanan publik. Diskusi mengenai dinamika birokrasi, budaya organisasi, hingga kepemimpinan transformasional memberi gambaran nyata tentang kompleksitas sektor publik. Selanjutnya, buku ini juga menyoroti aspek etika dalam pelayanan publik, pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis good governance, serta pengelolaan anggaran sektor publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai penutup, bab tentang administrasi publik di era digital menguraikan transformasi menuju e-government, tantangan digitalisasi, serta kebijakan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan cakupan materi yang luas dan sistematis, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa, peneliti, maupun praktisi yang ingin memperdalam pemahaman tentang administrasi publik dan relevansinya dalam menjawab tantangan zaman.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pemasok & Penerbitan Buku
0815-7000-699

Pemerintahan

ISBN 978-634-246-353-6



9 786342 463536